

**EFEKTIVITAS LEMBAGA PENYELENGGARA RUMAH DUTA REVOLUSI
MENTAL (RDRM) DALAM PENCEGAHAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN
DAN BULLYING ANAK DI KOTA SEMARANG**

Indah Nurayuni, Maesaroh, Nina Widowati
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Semarang City Government has established the Rumah Duta Revolusi Mental to address violence against children, but The number of child violence in Semarang City in 2020 was 71 cases, in 2021 it increased to 80 cases, an increase of 12% and in 2022 there were 136 cases or an increase of 70%. This research aims to analyze the effectiveness of the RDRM in preventing cases of child violence and bullying in Semarang City and analyzes the supporting factors that inhibit the effectiveness of the RDRM. The method used is a descriptive qualitative method. Data collection techniques through interviews, observation, documentation and literature study. The findings, namely achieving goals, integration and adaptation, show that on the prevention side, RDRM has not been effective in preventing violence and bullying because psychoeducation services have not been optimal, while on the treatment side RDRM has been said to be effective as proven by the number of clients who have been treated. Inhibiting and supporting factors the effectiveness of RDRM are organizational characteristics, environmental characteristics, employee characteristics and practical and management capabilities. The conclusion is that the prevention of violence and bullying carried out by RDRM organizing institutions has not been effective, while the handling of violence and bullying has been effective. Therefore, the recommendation is to disseminate information on internship recruitment regularly and open internships for students from the computer science category to help manage social media.

Keywords: Effectiveness, Rumah Duta Revolusi Mental, P2KKB

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keluarga termasuk orang tua kandung dapat melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan anak yang dilakukan dalam rumah tangga sering dianggap wajar sebagai upaya pendisiplinan anak oleh orang tua. Di

Indonesia, tindak kekerasan terhadap semakin meningkat dari tahun ke tahun, harus ada perhatian khusus dalam perlindungan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak. Anak Salah satu hak anak yang penting untuk dipenuhi adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Pada kenyataannya terdapat kasus kekerasan dan bullying pada anak dalam lingkungan pendidikan yang mempengaruhi kehidupan mereka, bahkan kekerasan dan bullying tersebut dilakukan tanpa sadar.

Tabel 1. Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020 – 2022

Tingkat Pendidikan	Tahun		
	2020	2021	2022
Tidak/Belum pernah sekolah	1.021	1.271	1.628
PAUD	153	150	96
TK	332	408	293
SD	3.549	4.127	4.996
SLTP	3.731	4.681	5.287
SLTA	2.455	3.161	3.328
Perguruan Tinggi	39	33	41
Lainnya	1.130	2.083	1.927
Jumlah	12.410	15.914	17.641

Sumber: SIMFONI Pemberdayaan Pelayanan Perempuan dan Anak, telah diolah kembali, 2023

Tabel 1 di atas menunjukkan korban kekerasan anak banyak terjadi di lingkungan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang tercatat dalam SIMFONI, pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 3.504 kasus atau

28,23% dan pada tahun 2021 hingga tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 1.727 kasus atau 10,85%.

Guna mewujudkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk melindungi anak-anak, pemerintah Indonesia membuat payung hukum dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan pemberian kesempatan hidup yang layak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Semua provinsi harus menyusun kebijakan serta merancang keberjalanan pemenuhan hak anak.

Salah satu provinsi yang memberikan prioritas terhadap perlindungan anak dan terpenuhinya hak-haknya adalah Provinsi Jawa Tengah. 31 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah ditetapkan ramah anak. Kota Semarang mendapat penghargaan Nindya pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Kota Semarang juga telah menetapkan peraturan dan membentuk lembaga penyelenggara untuk melindungi dan menjamin pemenuhan hak-hak anak, namun angka kekerasan dan *bullying* anak di Kota Semarang semakin meningkat.

**Tabel 2 Jumlah Anak Korban
Kekerasan di Kota Semarang**

Tingkat Pendidikan	Tahun		
	2020	2021	2022
0-5	7	8	11
6-12	24	24	60
13-18	40	48	65
Jumlah	71	80	136

Sumber: ASIK PAK Kota Semarang, telah diolah kembali, 2023

Tabel 2 dalam Aplikasi Sistem Informasi dan Komunikasi Kekerasan Perempuan dan Anak (ASIKK PAK) Kota Semarang menunjukkan bahwa jumlah kekerasan anak yang tercatat di Kota Semarang tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 9 kasus atau 12% dan mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2022 sebanyak 56 kasus atau 70%. Kasus kekerasan yang terjadi diantaranya yaitu kasus kekerasan fisik terhadap anak, anak dan balita yang ditelantarkan, anak berandalan, dan anak yang terkena masalah hukum.

Tingginya kasus kekerasan anak di ibukota dari Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak dari Tindak Kekerasan yang menjamin untuk melindungi anak dan menurunkan angka kekerasan anak di Kota Semarang. Kondisi

tersebut mengharuskan Pemerintah Kota Semarang untuk membuat satu lembaga khusus yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan anak, sehingga didirikanlah Rumah Duta Revolusi Mental

Rumah Revolusi Mental Duta Besar (RDRM) juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental pada program ke 3 (tiga) yaitu Program Gerakan Indonesia Tertib dan berfokus pada poin h.

Pengembangan dan pelaksanaan RDRM berlandaskan pada Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/35 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang. Rumah Duta Revolusi Mental menjadi perwujudan keseriusan Pemerintah Kota Semarang untuk menurunkan jumlah fenomena kekerasan perempuan dan anak-anak dalam rangka mendorong keberhasilan Kebijakan Kota Layak Anak guna menciptakan lingkungan yang ramah terhadap anak.

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang pada pasal 2 ayat (7) dijelaskan bahwa RDRM adalah lembaga yang dibentuk

oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mendukung pencegahan, pemulihan pelaku tindak kekerasan, dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang bertanggung jawab pada Walikota melalui Dinas.

Pada awalnya Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) menjadi lembaga penyelenggara di bawah Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Terjadi perubahan dan pergeseran tugas sehingga kini hanya fokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak dalam status sekolah dan berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Rumah Duta Revolusi Mental telah mengatasi kasus kekerasan hingga anak-anak tidak mengalami trauma, tetapi dalam pencegahan kekerasan RDRM masih memiliki kelemahan. Kurangnya penanganan dan pencegahan yang dilakukan karena keterbatasan jumlah pegawai dalam proses sosialisasi pencegahan kekerasan ke semua sekolah di Kota Semarang. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Kemendikbud, jumlah sekolah di Kota Semarang semester 2023/2024 sebanyak 510 Sekolah Dasar dan 200 MTS/SMP. Sedangkan, pegawai Rumah Duta Revolusi Mental sebanyak 7 orang dengan rincian 4 konsultan, 2 psikolog dan 1 orang pengelola teknologi informasi

sehingga kurang efektif dalam pencegahan kekerasan anak.

Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dibentuk di Kota Semarang sejak tahun 2017, namun jumlah kekerasan anak di Kota Semarang belum mengalami penurunan yang konsisten. Peneliti mengkaji efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dan *Bullying* pada Anak karena terindikasi terdapat masalah berupa belum efektifnya lembaga penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang yang dibuktikan dengan meningkatnya angka kekerasan di Kota Semarang.

Berdasarkan mempertimbangkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka research question penelitian ini yaitu Mengapa Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) belum dapat menurunkan angka Kasus Kekerasan dan *Bullying* Pada Anak di Kota Semarang secara signifikan?

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sudah efektif dalam Pencegahan Penanganan Kasus

Kekerasan dan Bullying Anak di Kota Semarang?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan Bullying Anak di Kota Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan Bullying Anak di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat Efektivitas Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan Bullying Anak di Kota Semarang

D. TEORI

1. Efektivitas Organisasi

Menurut etimologinya, istilah efektivitas berasal dari kata Bahasa Inggris "*effective*" yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Effendy mendefinisikan efektivitas sebagai proses komunikasi untuk mencapai

tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan alokasi dana, batasan waktu, dan jumlah pegawai (Luki Natika, 2020: 4).

Organisasi menurut Sondang P.Siagian adalah bentuk perserikatan sekelompok manusia yang terikat secara formal dalam hubungan hirarki yang memiliki tujuan sama, dimana dalam hubungan hirarki tersebut terdapat sekelompok orang menjadi pemimpin dan sekelompok orang menjadi pegawai (Sari E.,2007:3). Lembaga penyelenggara adalah entitas yang bertanggung jawab secara khusus atas penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu kegiatan atau layanan.

Perbedaan utama antara lembaga penyelenggara dan organisasi adalah bahwa lembaga penyelenggara menekankan pada pelaksanaan layanan atau kegiatan tertentu dengan tanggung jawab khusus, sedangkan organisasi mengacu pada entitas yang lebih luas dengan struktur formal dan tujuan yang mungkin lebih beragam.

Efektivitas organisasi adalah keterampilan organisasi dalam mengoptimalkan semua sumber daya organisasi secara efektif dan efisien dengan tujuan mencapai target organisasi (Sari E., 2006, p. 62). Dalam

Pasolong H. (2010:4) terdapat beberapa pendapat mengenai efektifitas organisasi yaitu efektivitas organisasi menurut Robbins adalah tingkat kinerja yang dicapai organisasi yang dipengaruhi oleh struktur, orang, dan kelompoknya. Menurut Keban, jika suatu organisasi mencapai prinsip atau tujuan yang digariskan dalam visi, maka organisasi tersebut dapat dianggap efektif.

2. Dimensi Efektivitas Organisasi

Menilai antara rencana dengan hasil aktual yang dicapai adalah cara untuk mengukur efektivitas. Sesuatu dianggap tidak efektif apabila usaha dan hasil pekerjaan tidak sesuai serta tidak dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan.

Menurut Gibson dalam Febriani, Eka dkk (2022:475) terdapat tiga dimensi efektifitas organisasi pada Pendekatan Sistem (System Approach) yaitu:

- a. Input
- b. Proses
- c. Output
- d. Umpan Balik (Feedback)
- e. Lingkungan (Environment)

Menurut Tangkilisan dalam (Hidayat, T. 2022:4943) terdapat lima dimensi efektivitas yaitu:

- a. Produktivitas
- b. Kemampuan Adaptasi atau Fleksibilitas
- c. Kepuasan Kerja
- d. Pencarian Sumber Daya

Dimensi efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers (1985:53), yaitu:

- a. Pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan merupakan semua usaha yang dilakukan untuk mencapai target melalui pemanfaatan berbagai sumber daya organisasi dan pengelolaan hambatan. Pencapaian tujuan dikatakan sukses apabila dapat menghindari sejumlah hambatan yang timbul. Pencapaian tujuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Proses perumusan tujuan dan Optimalisasi tujuan.

- b. Integrasi

Integrasi efektivitas organisasi merujuk pada kemampuan organisasi untuk menggabungkan dan menyusun berbagai komponen dan proses agar dapat mencapai tujuan secara efisien (Steers, 1985:63). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi integrasi organisasi yaitu: Prosedur kegiatan dan Proses dalam sosialisasi.

- c. Adaptasi

Adaptasi organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mengubah standar operasinya menyesuaikan dengan lingkungan yang mengalami perubahan serta

untuk menghindari kekakuan organisasi atas rangsangan lingkungan (Steers, 1985:48). Adaptasi memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu: peningkatan kemampuan, dan inovasi.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor penghambat dan pendukung efektivitas organisasi menurut Richard M. Steers (1985:209-216) yaitu:

a. Ciri Organisasi

Ciri organisasi yang memengaruhi efektivitas organisasi yaitu teknologi dan struktur organisasi. Teknologi berkaitan dengan proses penggabungan mekanis dan intelektual manusia dalam organisasi untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki organisasi. Struktur dalam organisasi berfungsi untuk mengatur pegawai dalam berbagai kegiatan menuju tujuan organisasi. merujuk pada tingkat desentralisasi, pembagian jumlah pekerjanya ke dalam bagian-bagian, formalisasi melalui peraturan dan prosedur yang formal atau resmi.

b. Ciri Lingkungan

Menurut Payne lingkungan internal atau iklim organisasi adalah seperangkat nilai, sikap, norma dan perasaan pegawai akibat dari kegiatan organisasi sehingga dapat memengaruhi perilaku mereka dalam organisasi. Lingkungan luar meliputi faktor-

faktor yang berada di luar batas organisasi berkaitan dengan tingkat keterdugaan situasi lingkungan, persepsi keadaan lingkungan, dan tingkat rasionalitas organisasi

c. Ciri Pekerja

Para pekerja yang membentuk struktur organisasi, mengoperasikan teknologi dan memberikan tanggapan pada keadaan lingkungan. Perilaku pegawai agar mampu mencapai keberhasilan hingga akhir bergantung pada beberapa faktor yaitu kejelasan peranan dan prestasi kerja, spontanitas dan inovatif pegawai, kemampuan membuat keputusan sendiri, dan keterikatan pada organisasi

d. Praktik dan Kemampuan Manajemen

Kemampuan Manajemen merupakan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengatur semua elemen organisasi melakukan setiap kegiatan guna mencapai efektivitas organisasi. Terdapat beberapa faktor yang berperan dalam menentukan efektivitas organisasi yaitu: pemanfaatan sumberdaya, kemampuan organisasi mengintegrasikan dan pengendalian organisasi untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan organisasi, proses komunikasi, untuk mengkoordinir dan memusatkan kegiatan pekerja ke tujuan dan sasaran organisasi, dan kepemimpinan dan pengambilan keputusan, berfungsi untuk

mengkoordinir unit-unit organisasi yang berbeda, mengarahkan pada penyelesaian tugas, dan menjaga stabilitas organisasi.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2015:18), metode penelitian kualitatif berlandaskan pada hakikat postpositivis yang menyatakan bahwa pengetahuan ilmiah tidak mungkin sepenuhnya objektif atau murni. Peneliti berusaha memberikan gambaran yang akurat secara rinci, detail, dan mendalam mengenai Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dalam Pencegahan Penanganan Kekerasan dan Bullying Anak di Kota Semarang beserta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dijabarkan dalam bentuk kata-kata atau tertulis.

Teknik pemilihan informan penelitian ini yaitu *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sumber data dengan tujuan dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015:85). Subjek penelitian yaitu : Penyusun Bantuan Hukum RDRM, Konselor Psikologi RDRM Staff Kurikulum dan Penilaian SD di Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan Staff Kurikulum dan Penilaian SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Sumber data penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara kepada beberapa informan, observasi langsung ke

lapangan, dan mendokumentasikan melalui gambar, catatan dan rekaman suara selama proses wawancara. Data sekunder penelitian ini dikutip dari internet, jurnal hasil studi, artikel, data regulasi pemerintah yang resmi, BPS Jawa Tengah dan Kota Semarang, SIMFONI, ASIK PAK, website Pemerintah Kota Semarang, website Dinas Pendidikan, website Rumah Duta Revolusi Mental dan Instagram Rumah Duta Revolusi Mental.

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Menurut Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Teknik triangulasi data merupakan salah satu metode yang dalam mengkaji kualitas data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Lembaga Penyelenggara RDRM dalam Pencegahan Penanganan Kasus Kekerasan dan *Bullying* Anak di Kota Semarang

1. Pencapaian tujuan

a. Perumusan Tujuan RDRM

Perumusan tujuan Rumah Duta Revolusi Mental dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu isu kesehatan mental yang

berkembang, instruksi Walikota Semarang, Dinas Pendidikan dan regulasi pemerintah Kota Semarang. Rumah Duta Revolusi Mental merupakan salah satu lembaga penyelenggara Dinas Pendidikan, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan mempertimbangkan masukan dari Rumah Duta Revolusi Mental. Proses perumusan tujuan Rumah Duta Revolusi Mental tidak mengalami konflik internal atau eksternal.

b. Pencapaian Tujuan RDRM

Optimalisasi pencapaian tujuan dilakukan Rumah Duta Revolusi Mental belum optimal, dilihat dari upaya RDRM yang belum mencapai tujuan secara keseluruhan karena sisi pencegahan kekerasan masih perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang dilakukan secara offline belum dilakukan secara rutin karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Rumah Duta Revolusi Mental melakukan sosialisasi apabila sekolah atau lembaga penyelenggara penanganan kekerasan anak lainnya mengundang RDRM untuk menjadi narasumber.

Sosialisasi yang dilakukan RDRM melalui media sosial juga belum rutin dilakukan. Instagram Rumah Duta Revolusi

Mental lebih difokuskan untuk mengunggah dokumentasi kegiatan daripada psikoedukasi di media sosial. Terlepas dari semua keterbatasan sumber daya dan kekurangan dalam sosialisasi, Rumah Duta Revolusi Mental menyusun dan menjalankan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya dan mengelola hambatan untuk menyebarkan wawasan baru mengenai isu psikologis ke masyarakat

2. Integrasi

a. Pembagian Tugas RDRM

Susunan keanggotaan RDRM secara administratif yaitu saat berada di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak terdapat Penyusun Bantuan Hukum yang ikut serta dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum, saat pindah ke Dinas Pendidikan secara administratif Penyusun Bantuan Hukum masih ada, tetapi secara praktik semua pegawai tidak lagi mendampingi anak secara hukum melainkan fokus pada layanan psikologi. Pembagian tugas internal dan eksternal dengan Dinas Pendidikan yang jelas tidak menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan tanggungjawab, tugas, dan kewenangan.

b. Koordinasi Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi belum dilaksanakan secara rutin dan terjadwal, tetapi komunikasi dan koordinasi sosialisasi dengan pihak eksternal

terjalin sangat baik. Lembaga penyelenggara RDRM telah membuat proposal usulan mengenai pelaksanaan roadshow ke 60 sekolah di Kota Semarang tahun 2020, tetapi saat itu pandemi Covid-19 menjadi hambatan. Sebagian besar anggaran difokuskan untuk menangani Covid-19 sehingga kunjungan ke sekolah untuk sosialisasi kekerasan dan *bullying* pada masyarakat sekolah tidak disetujui oleh Dinas Pendidikan.

c. Prosedur Layanan RDRM

Pelaksanaan layanan Rumah Duta Revolusi Mental harus memohonan izin kepada Dinas Pendidikan. Izin tersebut hanya yang bersifat melibatkan pihak eksternal, seperti RDRM diundang menjadi pembicara saat MPLS. Apabila Rumah Duta Revolusi Mental melakukan sosialisasi melalui Instagram RDRM, rapat internal, unggah dokumentasi kegiatan, maka tidak memerlukan izin dari Dinas Pendidikan. Lembaga penyelenggara Rumah Duta Prosedur kegiatan dan layanan Rumah Duta Revolusi Mental menunjukkan tingkat formalisasi yang tinggi.

3. Adaptasi

a. Upaya Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan

Adaptasi Rumah Duta Revolusi mental dikaji melalui kelengkapn fasilitas RDRM,

peningkatan kemampuan pegawai dan inovasi. Rumah Duta Revolusi Mental tidak merancang program pelatihan dan peningkatan kemampuan internal tertentu, melainkan hanya bertukar pendapat mengenai pembahasan kasus baru atau perkembangan isu psikologis melalui rapat dan evaluasi rutin. Pegawai Rumah Duta Revolusi Mental juga mengajukan permohonan keikutsertaan dalam pelatihan dan seminar isu psikologis. Dinas Pendidikan akan memfasilitasi transportasi dan biaya penginapan setelah menerima proposal permohonan izin.

b. Ketersediaan Fasilitas RDRM

Fasilitas pendukung di Rumah Duta Revolusi Mental sudah cukup lengkap. Dinas Pendidikan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh RDRM misalnya Dinas Pendidikan baru saja menyetujui permohonan RDRM untuk menambah 1 (satu) ruangan. Di sisi lain, peralatan komputer di RDRM telah digunakan semenjak tahun 2017, beberapa komputer telah berjalan lambat sehingga perlu adanya pembaharuan fasilitas. Pegawai RDRM berharap Dinas Pendidikan menyediakan kendaraan dinas untuk mendorong upaya penjangkauan masyarakat yang terkendala ekonomi dan akses ke RDRM.

c. Inovasi Rumah Duta Revolusi Mental

Inovasi Rumah Duta Revolusi Mental sudah adaptif sesuai kebutuhan masyarakat yang dinamis menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Gebersepti (Gerakan

Bersama Sekolah Semarang Peduli dan Tanggap Bullying) yang merupakan inovasi Rumah Duta Revolusi Mental meraih predikat top 10 pada tahun 2021 dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan pemerintah Jawa Tengah. Dinas Pendidikan berperan dalam publikasi, perizinan, pemberian dana, laporan hasil, dan koordinasi inovasi dengan pemangku kebijakan lainnya. Inovasi yang telah dibentuk oleh RDRM akan dikoordinasikan dengan bidang-bidang terkait di Dinas Pendidikan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Efektivitas Lembaga RDRM

1. Ciri Organisasi

a. Partisipasi Pegawai Dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan mengenai layanan di Rumah Duta Revolusi Mental bergerak dalam satu komando koordinator, tetapi jika menghadapi kasus yang harus segera ditangani akan bergerak terlebih dahulu tanpa menunggu komando. Pengambilan keputusan dalam melayani

masyarakat di dilakukan oleh banyak pihak karena setiap pegawai bertugas wawancara orang tua, siswa, dan sekolah. Menentukan keputusan akhir dilakukan melalui diskusi bersama dengan koordinator Rumah Duta Revolusi Mental. Pegawai tidak memiliki wewenang dalam menentukan keputusan yang menyangkut eksternal lembaga tanpa berdiskusi dengan Dinas Pendidikan.

b. Jumlah Pegawai Rumah Duta Revolusi Mental dengan Beban Kerja

Jumlah pegawai Rumah Duta Revolusi Mental tidak cukup jika dibandingkan dengan beban tugas yang diemban. Rumah Duta Revolusi Mental tidak hanya menangani kasus kekerasan dan *bullying* di satuan pendidikan, tetapi bertugas juga dalam melayani ABK sekolah inklusi.

Terbatasnya SDM mengharuskan pegawai RDRM merangkap banyak tugas untuk tetap berusaha memberikan layanan yang optimal.

Pegawai Rumah Duta Revolusi Mental terdiri dari 7 pegawai yaitu 1 (satu) koordinator sekaligus psikolog, 1 (satu) psikolog lainnya, 2 (dua) konselor psikologi, 2 (dua) penyusun bantuan hukum, dan 1 (satu) teknologi informasi.

c. Tingkat Kepatuhan Pegawai Terhadap Peraturan dan Prosedur

Rumah Duta Revolusi Mental berjalan dengan mematuhi undang-undang,

peraturan, kode etik psikologi, intruksi instansi yang lebih tinggi dan ISO 9001:2015. Kerahasiaan data dan masalah klien sangat dijaga ketat sesuai dengan kode etik psikolog. Pegawai RDRM memahami bahwa jika tidak mematuhi prosedur, maka akan menimbulkan permasalahan dan ketidakpuasan klien terhadap layanan Rumah Duta Revolusi Mental.

c. Pemanfaatan Teknologi Dalam Kegiatan RDRM

Website resmi belum dikelola secara optimal oleh RDRM karena keterbatasan pengelola. Layanan Rumah Duta Revolusi Mental belum sepenuhnya terkomputerisasi karena alat tes psikologi seperti hasil gambar dan tulisan anak dilakukan secara manual, tetapi layanan RDRM lainnya telah mengadopsi teknologi seperti seminar online melalui zoom meeting, konseling melalui telepon dan balasan pesan otomatis. Identitas klien, ringkasan kasus, hasil kasus, jumlah kasus yang telah ditangani, dan laporan kepada Dinas Pendidikan atau Pemerintah Kota Semarang direkap melalui komputer

2. Ciri Lingkungan

a. Tantangan Internal dan Eksternal Rumah Duta Revolusi Mental

Tantangan internal Rumah Duta Revolusi Mental berkaitan dengan terbatasnya jumlah pegawai RDRM dan

anggaran yang diberikan. Tantangan eksternal terhadap pelayanan di Rumah Duta Revolusi Mental yaitu batas waktu, komitmen klien, dan sikap klien. Cara mengelola masalah tersebut dengan bersikap tenang agar anak dapat merasa nyaman serta aktif berkomunikasi dan selalu mengingatkan orang tua terkait jadwal asesmen. Apabila tidak memungkinkan klien datang langsung ke RDRM, orang tua dapat melakukan konseling online melalui WhatsApp.

b. Kesesuaian Antara Kondisi Lingkungan Internal RDRM Dengan Kondisi yang Diharapkan

Lingkungan internal Rumah Duta Revolusi Mental yang sebenarnya terjadi sesuai dengan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan pegawai. Hubungan antar pegawai terjalin harmonis karena kesadaran pegawai sendiri untuk bersikap profesional. Komunikasi yang terjalin sangat baik, selain karena tingginya sikap profesional pegawai, usia antar pegawai tidak terpaut jauh. Hubungan dengan koordinator RDRM berjalan lancar, pola komunikasi yang informal menambah kerekatan hubungan.

3. Ciri Pekerja

a. Inisiatif dan Ketanggapan Pegawai

Pegawai Rumah Duta Revolusi Mental selalu tanggap dalam merespon laporan

masyarakat. Semua layanan di Rumah Duta Revolusi Mental dilayani berdasarkan antrian yang masuk, tetapi jika terdapat kasus mendesak akan dilayani terlebih dahulu. Jam kerja pegawai RDRM pada Senin-Kamis dari jam 08.00-16.00 dan hari Jumat dari 07.30-14.00. Setiap hari secara bergantian, terdapat satu pegawai RDRM yang tidak menangani klien untuk bersiap dan siaga jika terdapat kasus mendesak.

b. Kompetensi Pegawai RDRM

kemampuan pegawai Rumah Duta Revolusi Mental telah sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan oleh RDRM. Kompetensi yang dibutuhkan oleh Rumah Duta Revolusi adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu psikologi. Perilaku pegawai terbiasa dengan anak-anak, menaati kode etik psikologi dan bisa bekerja dalam tim. Bagian teknologi informasi yang bertugas memonitor media sosial dan aduan di Whatsapp serta bertanggung jawab dalam pembuatan design unggahan merupakan lulusan sarjana komputer.

c. Keterikatan Pegawai RDRM

Keterikatan pegawai pada Rumah Duta Revolusi Mental yang terjadi lebih condong pada keikatan (*commitment*) daripada keterikatan (*attachment*). Keikatan pegawai dengan Rumah Duta Revolusi Mental karena

adanya keinginan individu untuk berkontribusi pada masyarakat. Minat dan keahlian pegawai terhadap layanan psikologis dan pendidikan meningkatkan motivasi untuk mendorong prestasi kerja. Selain ketertarikan pribadi dan pilihan hidup, motivasi yang timbul karena kesenangan pribadi melihat masyarakat berpogres dan merasa terbantu dengan layanan yang diberikan.

4. Praktik dan Kemampuan Manajemen

a. Pengelolaan Sumber Daya RDRM

Cara koordinator Rumah Duta Revolusi Mental dalam pengendalian organisasi dan mengintegrasikan sistem RDRM yaitu melalui rapat dan evaluasi rutin. Pembahasan saat rapat dan evaluasi seputar kasus yang memerlukan asesmen lanjutan, undangan pihak eksternal, dan informasi tambahan. Koordinator menetapkan praktek yang mengatur sebagian besar aktivitas RDRM. Pengendalian fisik meliputi pemeliharaan, pemeriksa peralatan, dan mengoptimalkan pemakaian fasilitas. Koordinator RDRM juga diketahui melakukan pengecekan rutin terhadap persediaan dan pemeliharaan fasilitas.

b. Komunikasi Internal dan Eksternal Rumah Duta Revolusi Mental

Komunikasi yang terjalin dengan berbagai pihak berjalan lancar dan baik.

Komunikasi yang terjalin dalam internal Rumah Duta Revolusi Mental yaitu antara sesama pegawai dan antara pegawai dengan koordinator RDRM adalah komunikasi horizontal yang mengembangkan sikap keterbukaan dan kedekatan pribadi. Komunikasi antara tim RDRM dengan Dinas Pendidikan dilakukan dengan komunikasi ke bawah. Menurut Steers (1985:177), komunikasi ke bawah memberikan pengertian kepada pekerja untuk melakukan apa saja yang diperlukan dan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Komunikasi ke atas juga terjalin antara tim RDRM dan Dinas Pendidikan jika RDRM membutuhkan perbaikan atau pengadaan fasilitas dan permohonan kerjasama dengan lembaga lain.

c. Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan

Semua hasil kasus yang telah dilakukan observasi akan diserahkan kepada koordinator RDRM untuk memohon intruksi tindak lanjutan. Fungsi penting koordinator RDRM yaitu memastikan tingkah laku pegawai diarahkan pada penyelesaian tugas, menentukan arah perubahan dan penyesuaian RDRM dalam lingkungan yang berubah. Pengambilan keputusan di RDRM yaitu keputusan konsultatif. Koordinator RDRM mengambil keputusan akhir setelah berkonsultasi dengan seluruh pegawai yang

terlibat berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan peninjauan terhadap kasus yang telah dilakukan.

KESIMPULAN

Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental belum efektif dalam mencegah kekerasan dan bullying anak di Kota Semarang. Hal tersebut dapat dibuktikan pada bagian pencapaian tujuan yaitu upaya optimalisasi tujuan seperti sosialisasi atau webinar belum dapat terlaksana secara rutin dan menjadi program inti karena terbatasnya sumber daya manusia.

Sosialisasi melalui Instagram pun belum rutin dilakukan. Instagram lembaga penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental lebih banyak digunakan untuk mengunggah dokumentasi hasil kegiatan daripada psikoedukasi yang memberikan wawasan baru. Adaptasi dalam hal fasilitas memiliki kendala yaitu pengelolaan Website resmi terakhir kali update pada tahun 2020 sehingga penyebaran informasi secara lengkap kepada publik cukup terhambat serta perlu pengadaan fasilitas mobilisasi dan computer baru.

Lembaga penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental telah dianggap efektif pada sisi penanganan yang dapat dibuktikan dengan optimalnya dimensi integrasi yaitu penanganan klien yang cepat tanggap,

kejelasan peran dalam pembagian tugas, integrasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal, program dan layanan lembaga penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental telah sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, dan peningkatan kemampuan yang mandiri. Mayoritas klien yang ditangani oleh RDRM merasa puas dengan kinerja Rumah Duta Revolusi Mental.

Ciri Organisasi yang menghambat efektivitas lembaga penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental yaitu terbatasnya sumber daya manusia sehingga program dan inovasi tidak rutin dilakukan serta pengambilan keputusan eksternal lembaga penyelenggara RDRM yang tidak dapat diputuskan langsung oleh RDRM tanpa berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Ciri Lingkungan yang menghambat efektivitas lembaga penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental yaitu pada tantangan internal yaitu terbatasnya jumlah pekerja dan tantangan eksternal meliputi keterbatasan waktu, komitmen klien, perilaku anak yang menyebabkan antrian panjang dan pelaksanaan asesmen yang sering dijadwalkan ulang.

Faktor pendukung dalam ciri organisasi yaitu yaitu pemanfaatan teknologi dan kepatuhan pegawai pada prosedur.

Faktor pendukung ciri lingkungan yaitu lingkungan internal yang harmonis, nyaman, dan suportif mendorong keinginan pegawai untuk bekerja lebih baik. Faktor pendukung dalam Ciri Pekerja yaitu inisiatif, kompetensi yang sesuai, dan motivasi pegawai yang tinggi. Faktor pendukung dalam Praktik dan Kemampuan Manajemen yaitu kepercayaan pegawai pada keputusan yang diambil koordinator lembaga penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental, komunikasi yang baik dengan pihak internal dan eksternal dan kepemimpinan koordinator lembaga penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental.

SARAN

Rekomendasi Efektivitas Lembaga Penyelenggara RDRM yaitu:

1. Optimalisasi pelaksanaan upaya pencegahan kekerasan dan bullying pada anak. Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental dapat mencari relawan atau peserta magang dari universitas Kota Semarang dengan menjadwalkan secara rutin waktu rekrutmen setiap tahunnya.
2. Rekrutmen relawan RDRM terbuka bagi semua jurusan yang dibutuhkan misalnya jurusan komputer atau teknik informatika. Relawan jurusan computer dan teknik informatika dapat menjadi admin

WhatsApp, pengelola website, dan pengelola sosial media.

3. Lembaga Penyelenggara Rumah Duta Revolusi Mental sebaiknya membuat proposal yang resmi dan terperinci tentang peningkatan fasilitas yang diusulkan dengan menyertakan informasi tentang dampaknya terhadap kinerja atau pelayanan.

Guna mengatasi faktor penghambat efektivitas Lembaga Penyelenggara RDRM, maka diperlukan beberapa upaya yaitu:

1. Ciri Organisasi. Menambah sumber daya manusia. Penyebaran informasi rekrutmen relawan, harus masif dilakukan melalui Instagram story, website Dinas Pendidikan, dan poster di papan informasi Dinas Pendidikan, memberikan informasi rekrutmen ketika menjadi narasumber kegiatan universitas.
2. Ciri organisasi. Tim RDRM harus dapat mengoptimalkan ide kreatifnya dengan mengunggah tips menyikapi *bullying*, pengetahuan kesehatan mental dan isu psikologis lainnya yang relevan dengan tugas, dan melakukan games melalui fitur Instagram story secara rutin.
3. Ciri Lingkungan. Mendatangi rumah klien atau melakukan konseling di tempat yang klien merasa nyaman. Perlu

adanya kendaraan operasional untuk memudahkan akses mobilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Faried dan Baharuddin. (2014). Ilmu Administrasi Dalam Pendekatan Hakikat Inti. Bandung: PT. Refika Aditama

Arikunto, S. (2010). Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Creswell, John W (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. (Ahmad Lintang L, Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Husaini, Usman (2014). Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Ibrahim, Amin. (2013). Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasi. Bandung: PT. Refika Aditama,

Keban, Yeremias T. (2014). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media.

Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik: Teori Efektifitas dalam kinerja. Yogyakarta.

Pasolong, Harbani. (2019). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Robbins, Stephen P. (2008). Perilaku Organisasi. Jakarta: Indeks

Sari, E. (2006). Teori Organisasi: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Jayabaya University Press.

Sari, E. (2007). Pertumbuhan dan Efektivitas Organisasi: Mengengola Lingkungan Melalui Penyesuaian Struktur Organisasi. Jakarta: Jayabaya University Press.

Satibi, I. (2012). *Manajemen Publik dalam Perspektif*. Bandung: Unpas Press.

Steers, R. M. (1985). *Organizational Efektiveness, A Behavioral View*. (Jamin, M Penerjemah.). Jakarta: Erlangga.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Jurnal:

Bawadi, Z., & Ratnasari, P. (2023). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 9(1), 71-82.

Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Dinamika Hukum*, 21(2), 44-51.

Febriani, E., Razak, A. R., & Malik, I. (2022). Efektivitas Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (Bbpom) Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Di Kota Makassar. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(2), 473-485.

Ferrer Cascales, R., Albadalejo Blázquez, N., Sánchez Sansegundo, M., Portilla Tamarit, I., Lordan González, O., & Ruiz Robledillo, N. (2019). Effectiveness Of The TEI Program For Bullying And Cyberbullying Reduction And School Climate Improvement.

Gaffney, H., Ttofi, M. M., & Farrington, D. P. (2021). Effectiveness Of School-Based Programs To Reduce Bullying Perpetration And Victimization: An Updated Systematic

Review And Meta-Analysis. *Campbell Systematic Reviews*, 17(2), E1143.

Hardiyanti, M., Purwanti, A., & Wijaningsih, D. (2018). Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Lembaga Layanan Rujukan (Rumah Aman) Di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 7(2), 122-136.

Hidayah, T. (2022). Efektivitas Pengelolaan Kebersihan Oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis (Studi Analisis di Pasar Manis Ciamis).

Herlina Pangabean, D. S. (2023). Waspada Tindakan Bullying dan Dampak Pada Dunia Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 10-11.

Kibtyah, M., Rohmah, A. M., & Maulana, K. A. (2021, November). The Implementation Of Trauma Healing To The Bullying At Rumah Duta Revolusi Mental Semarang. In *Proceedings Of International Conference On Da'wa And Communication (Vol. 3, No. 1, Pp. 108-123)*.

Krisdyawati, A. R., & Yuniningsih, T. (2019). Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 239-264.

Kustanti, E. R. (2015). Gambaran Bullying Pada Pelajar Di Kota Semarang. *Jurnal Psikologi Undip*, 14(1), 29-39.

Lenak, S. C., Sumampow, I., & Waworundeng, W. (2021). Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government Di Dinas Pendidikan Kota Tomohon. *GOVERNANCE*, 1(1).

Maleke, T. S., Pangkey, M., & tampongangoy, D. (2022). Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (Kb) Di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(119)

Muntasiroh, L. (2019). Jenis-Jenis Bullying dan Penanganannya di SD N Mangonharjo Kota Semarang. *Jurnal Sinektik*, 2(1), 106-116.

Natika, L., & Nuraida, N. (2020). Efektivitas Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Terungtum Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Pusakanagara). *The World of Public Administration Journal*.

Prastowo, F. A. A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. *PRofesi Humas*, 5(1), 17-37.

Rahayu, B. A., & Permana, I. (2019). Bullying di sekolah: Kurangnya empati pelaku bullying dan pencegahan. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(3), 237-246

Sari, M., Siswati, T., Suparto, A. A., Ambarsari, I. F., Azizah, N., Safitri, W., & Hasanah, N. (2022). Metodologi Penelitian. *Global Eksekutif Teknologi*.

Sari, Cica. N., Heriyanto, M., & Rusli, Z. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 16(2), 135-141.

Susan, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952-962.

Singh, B. (2022). Child Abuse In Household & Schools In India: Legal Recourse To

Rescue. *Journal Of Positive School Psychology*, 6(9), 3489-3500.

Syahrudin, M. (2019). Efektifitas Target-Bullying Intervention Program (T-BIP) Dalam Kasus Bullying Di Kabupaten Pangkep. *Indonesian Journal Of Educational Science (IJES)*, 1(2), 95-103.

Natika, L., & Nuraida, N. (2020). Efektivitas Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Terungtum Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Pusakanagara). *The World Of Public Administration Journal*.

Utami, C. T., Adiyanti, M. G., Patria, B., & Minza, W. M. (2020). Bullying Survivors: The Dynamic Of Frequency, Forms Of Bully And The Response Of Survivors. *PSIKODIMENSIA*, 19(1), 94-105.

Widiastuti, S., Bachri, B. S., & Maureen, I. Y. (2023). The New World Kirkpatrick Model (NWKM) Pada Pelatihan Mandiri Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) Melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM). *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(2).

Internet:

Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (2023). <https://semarangkota.bps.go.id/>. Diakses pada 23 Agustus.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. (2023). <http://ppt.dp3a.semarangkota.go.id/>. Diakses pada 20 September.

Dinas Pendidikan Kota Semarang. (2023). <https://disdik.semarangkota.go.id/>

Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang. (2023).

<https://rdm.semarangkota.go.id/web/>. Diakses pada 23 Agustus.

Simfoni-PPA. (2023).
<https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan>. Diakses pada 18 Maret.

Waluyo, Adi, (2021). Proteksi Psikologis Bagi Peserta Didik Korban Perundungan di Kota Semarang, dari <https://gebersepti.semarangkota.go.id/detailpost/proteksi-psikologis-bagi-peserta-didik-korban-perundungan-di-kota-semarang>. Diakses pada 18 Maret.

Regulasi:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/35 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pada Rumah Duta Revolusi Mental Kota Semarang

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/1527/M.SM.01.00/2023 tentang Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Pendidikan Kota Semarang

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang